



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
INSPEKTORAT

Jl. Pemuda No. 127 – 133, Telp. (024)3517283-3517284-3556230 Fax. (024)3514351
SEMARANG 50132

Surel: inspektorat@jatengprov.go.id Laman: <http://inspektorat.jatengprov.go.id>

Semarang, 27 Mei 2022

Nomor : 051.2/1226/1.1/2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 set
Hal : Laporan Hasil Reviu (LHR)
PMPRB Badan Pengelola
Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2022

Kepada

Yth. Kepala Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Jawa Tengah
di -
SEMARANG

Kami telah melakukan reviu PMPRB pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Substansi informasi yang dimuat dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMPRB menjadi tanggung jawab Assesor pada perangkat daerah Saudara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi telah disajikan dengan data dukung yang akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, terdapat beberapa catatan sebagaimana Hasil Reviu terlampir.

Demikian atas perhatian dan kerjasama Saudara disampaikan terima kasih.

Pt. INSPEKTUR PROVINSI
JAWA TENGAH

Inspektur Pembantu Khusus



DHONI WIDIANTO, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19731015 199703 1 002

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah.



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
INSPEKTORAT**

JL. PEMUDA No. 127 - 133
SEMARANG 50132 Telp. : 024 - 3556230 Fax. : 024 - 3514351
E-MAIL: INSPEKTORAT@JATENGPROV.GO.ID
WEB: INSPEKTORAT.JATENGPROV.GO.ID

No.Dok :
IPPJT.IP.SOP.01.IK.00.FM.02
No.REVISI : 01
TANGGAL : 30 APRIL 2014

**HASIL REVIU
PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (PMPRB)
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

Nomor : *DSI.2/1226/1.1/2022*
Tanggal : 27 Mei 2022
Lampiran :
Tentang : Reviu Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
Pada : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran : 2022

Sehubungan dengan surat penugasan Inspektur Provinsi Jawa Tengah Nomor 094/42/S.1/2022 tanggal 23 Mei 2022 untuk melaksanakan reviu Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, bersama ini kami sampaikan Hasil Reviu dengan kondisi data dukung per tanggal 20 Mei 2022 sebagai berikut:

Berdasarkan reviu kami, diketahui bahwa PMPRB Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah 2022 pada prinsipnya sudah dilengkapi dengan data dukung sesuai dengan ketentuan.

Namun demikian masih dijumpai adanya beberapa catatan yang perlu dilengkapi atau mendapatkan perbaikan/koreksi diantaranya adalah:

A. PENGUNGKIT

I. PEMENUHAN

1. MANAJEMEN PERUBAHAN

Beberapa catatan pada aspek Manajemen Perubahan antara lain melengkapi bukti dukung:

ii. Road Map Reformasi Birokrasi.

- Belum melengkapi undangan, daftar hadir rapat rencana aksi Reformasi Birokrasi yang ditujukan kepada seluruh pegawai beserta laporan yang telah disahkan;

- Sudah terbentuk Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi namun belum dilengkapi dengan laporan evaluasi.

iii. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tim Reformasi.

- Belum dilengkapi lembar kerja LKE yang sudah disahkan oleh Ketua Tim Reformasi Birokrasi.

2. DEREGULASI KEBIJAKAN

Melengkapi bukti dukung matrik perubahan regulasinya serta proses surat pengajuan perubahan regulasi dimaksud.

3. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

i. Evaluasi Kelembagaan

- Belum dilengkapi dengan proses telaah penyederhanaan organisasi;
- Melampirkan data dukung penilaian tingkat kematangan organisasi Tahun 2021;
- Melengkapi SKP tahun 2021 dan 2022 serta PK.

ii. Tindak Lanjut Evaluasi.

Untuk dapat melampirkan proses terakhir dari perubahan organisasi dimaksud.

4. PENATAAN TATA LAKSANA

Catatan pada aspek Penataan Tata Laksana belum melengkapi bukti dukung Proses Bisnis dan notulen hasil evaluasi yang telah dilakukan terhadap proses bisnis.

5. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

i. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi

- Peta Jabatan dengan kondisi saat ini dan kebutuhannya;
- Untuk dapat melampirkan SK IKU.

ii. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi

- Perencanaan kebutuhan diklat;
- Rekapitulasi pegawai yang telah mengikuti diklat, bimbingan teknis dan sosialisasi tahun 2021.

iii. Penetapan Kinerja Individu

- Untuk dapat melengkapi data SKP tahun 2021 dan tahun 2022, PKP tahun 2021;

- Melengkapi SKP berjenjang dari level tertinggi sampai level terendah yang memiliki kesesuaian dengan PK;
- Penilaian laporan SKP berjenjang dari level tertinggi sampai level terendah;
- Laporan hasil penghitungan pemotongan TPP.

iv. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai

Catatan pada aspek Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai belum melengkapi bukti dukung berupa proses penegakan aturan disiplin pegawai berupa hasil berita acara, undangan rapat dan dokumentasi.

v. Pelaksanaan Evaluasi Jabatan

- Belum melengkapi data dukung dari standar kompetensi jabatan dan evaluasi jabatan;
- Penambahan Peraturan Gubernur nomor 73 tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Manajerial;
- Peraturan Gubernur nomor 61 tahun 2018 tentang Kualifikasi Kompetensi Teknis Jabatan Pimpinan Tinggi Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

6. PENGUATAN AKUNTABILITAS

Beberapa catatan pada aspek Penguatan Akuntabilitas antara lain melengkapi bukti dukung:

i. Keterlibatan Pimpinan

- Belum melampirkan undangan pembahasan penyusunan renstra, daftar hadir, notulen dan dokumentasi yang melibatkan pimpinan;
- Belum melampirkan undangan pembahasan penyusunan PK, daftar hadir, notulen dan dokumentasi yang melibatkan pimpinan;
- Belum melampirkan SKP tahun 2021 dan 2022 serta PK tahun 2021.

7. PENGUATAN PENGAWASAN.

i. Gratifikasi

- Belum melampirkan laporan terkait penanganan gratifikasi dan proses tindak lanjut serta evaluasi.

ii. Penerapan SPIP

- Belum melampirkan bukti dukung pengendalian intern berupa laporan hasil pemantauan serta hasil evaluasi atas penerapan SPI.

iii. Pengaduan Masyarakat

Pada aspek Pengaduan Masyarakat belum ada kesesuaian antara data dukung yang dilampirkan dengan daftar *evidence*.

iv. *Whistle Blowing System*

Untuk dapat melampirkan data dukung laporan pelaksanaan, undangan, daftar hadir dan dokumentasi.

v. Penanganan Benturan Kepentingan

- Dapat melampirkan SK Benturan Kepentingan;
- Notulen hasil rapat monitoring terkait benturan kepentingan;
- Laporan Evaluasi benturan kepentingan.

vi. Pembangunan Zona Integritas

- Dapat melampirkan SK Zona Integritas;
- Proses pengajuan pembentukan Zona Integritas dan hasil rapat.

8. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Pada aspek Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik untuk dapat melampirkan data dukung berupa SK Maklumat Pelayanan yang mencantumkan standar pelayanan.

B. REFORM

I. PEMENUHAN

1. MANAJEMEN PERUBAHAN

i. Komitmen dalam Perubahan

Melampirkan data dukung yang menunjukkan 1 (satu) agen perubahan membuat 1 (satu) inovasi/perubahan yang telah diimplementasikan dalam sistem manajemen dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas/pelayanan.

ii. Melengkapi data dukung berupa LKJiP, Renja dan Renstra

iii. Melengkapi SKP, PK dan SOP

3. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

Melampirkan data dukung berupa surat usulan pengajuan perubahan SOTK, hasil rapat, daftar hadir dan dokumentasi pada saat pembahasan perubahan SOTK

4. PENATAAN TATALAKSANA

- i. Dapat menambahkan data dukung berupa screenshot TNDE

5. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN

- i. Melampirkan DPA tahun 2021 dan 2022
- ii. Hasil assesmen BKD
- iii. Melampirkan SK Hukuman disiplin yang telah disahkan

6. PENGUATAN AKUNTABILITAS

- i. DPA tahun 2022 dan 2021 dapat dilampirkan sebagai data dukung
- ii. Melampirkan data dukung screenshot e-controlling
- iii. Melengkapi SK Pemberian Reward dan Punishment

7. PENGUATAN PENGAWASAN

Sudah sesuai namun belum dilakukan penilaian mandiri

Sehubungan dengan hal tersebut, kepada Tim Reformasi Birokrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah disarankan agar segera melengkapi data dukung dimaksud dalam catatan di atas atau merevisi penilaian mandiri yang telah dilakukan sebelumnya selambat-lambatnya tanggal 3 Juni 2022.

Semarang, 27 Mei 2022

Pengendali Teknis



Bagus Panuntun, S.STP, MA
Penata Tk. I
NIP. 19871119 200602 1 001

Ketua Tim Reviu



Wahyu Harum Wulandari, S.IP., M.Si
Penata Tk. I
NIP. 19851125 200903 2 007

Sekretaris
selaku
Pengendali Mutu



Nur Rohmat, S.SoS, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690505 198903 1 008